

18. RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar, diperlukan adanya rencana kerja yang memberikan arah & acuan yang jelas dengan memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan & mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada serta sarana dan prasarana yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), yang menyebutkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Jenjang perencanaan daerah terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 273 (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan kedalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD). Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 13 Ayat (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Mengacu pada pasal 16 Ayat (2) Permendagri no 86 Tahun 2016 Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Sementara berdasarkan Pasal 126 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Setelah disusun berdasarkan tahapan dan tata cara, maka rancangan Renja Perangkat Daerah disempurnakan menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar tahun 2026 disusun dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju;

2. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Disbudpar tahun 2025 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Disbudpar dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Disbudpar;
 3. Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2026 dan perkiraan maju tahun 2027;
 4. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2026, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
- 1.1.1. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD
- Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Penyusunan renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Rancangan Awal (Ranwal) Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Disbudpar Kota Blitar Tahun 2026 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar tahun 2026.
- 1.1.2. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah
- Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja perangkat Daerah juga berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri nomor 87 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara dokumen renstra dengan dokumen renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan renja Disbudpar Kota Blitar tahun 2026 juga berpedoman pada Rencana Strategis Disbudpar Kota Blitar Tahun 2025-2029
- 1.1.3. Keterkaitan antara Renja PD dengan Renja Kementerian/ Lembaga dan Renja Provinsi
- Renja Kementrian/Lembaga (Renja Kementrian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementrian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/dan Renja Provinsi (Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur) tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun Renja Kementrian dan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana program provinsi dan pusat yang dapat berpengaruh langsung terhadap Renja Disbudpar Kota Blitar tahun 2026.
- 1.1.4. Renja dan Tindak lanjutnya dalam APBD
- Renja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar tahun 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Disbudpar Kota Blitar Tahun 2026. Sedangkan RKA Disbudpar Kota Blitar Tahun 2026 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD) tahun 2026 yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kota Blitar. Oleh karena itu Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kota Blitar Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Renja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar tahun 2026 di susun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6).
26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 21);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2026 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2026.

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2026 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025
- 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

- 5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja
- 5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
- 5.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi capaian pelaksanaan Renja Disbudpar Kota Blitar tahun 2023, 2024 dan prakiraan capaian tahun 2025 dengan mengacu pada APBD tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target periode akhir Renstra Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar tahun 2021- 2026.

Untuk program Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2023, 2024 dan tahun 2025 adalah :

1. Program Pengembangan Kebudayaan
2. Program Pembinaan Sejarah
3. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
5. Program Pemasaran Pariwisata
6. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
7. Program Penunjang Urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d tahun 2025 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar tersaji pada tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra s/d tahun 2025
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2026) (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
								Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2. 2 2				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
				Tujuan 1 : Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Kelestarian Cagar Budaya	Persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal	2,97%	2,07%	2,26%	2,64%	116,81%	2,48%	3,08%	103,7%
				Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas kegiatan Seni Budaya	Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Aktif	75%	87%	87,94%	88,44%	100,56%	87,24%	87,24%	116,32%
2. 2 2	0 2 2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase budaya lokal yang dikembangkan	100%	75%	85%	85%	100%	100%	100%	100%
2. 2 2	0 2 2	2. 0 1		Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan kebudayaan yang terfasilitasi	9 kelompok	9 kelompok	9 kelompok	9 kelompok	100%	9 kelompok	9 kelompok	100%

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2026) (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
								Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2. 2 2	0 2 1	2. 0 1	00 01	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 objek	1 objek	1 objek	1 objek	100%	1 objek	1 objek	100%
2. 2 2	0 2 1	2. 0 02	00 02	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	8 orang	8 orang	8 orang	8 orang	100%	8 orang	8 orang	100%
2. 2 2	0 2 2	2. 0 2		Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelestarian kesenian tradisional yang terfasilitasi	10 event	8 event	10 event	10 event	100%	10 event	10 event	100%
2. 2 2	0 2 2	2. 0 2	00 02	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	10 laporan	8 laporan	10 laporan	10 laporan	100%	10 laporan	10 laporan	100%
2. 2 2	0 4 2			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase kesejarahan yang dikembangkan	90%	80%	90%	90%	100%	90%	90%	100%
2. 2 2	0 4 1	2. 0 1		Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan event sejarah yang terfasilitasi	7 event	7 event	7 event	7 event	100%	7 event	7 event	100%
2. 2 2	0 4 1	2. 0 01	00 01	Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	6 event	6 event	6 event	6 event	100%	6 event	6 event	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2026) (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
								Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2. 2 2	0 4 1	2. 0 1	00 02	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	1 jenis	1 jenis	100%
				Tujuan 1 : Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Kelestarian Cagar Budaya	Persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal	2,97%	2,07%	2,26%	2,64%	116,81%	2,64%	2,64%	88,87%
				Sasaran 2 : Meningkatnya cagar budaya yang dimanfaatkan	Persentase cagar budaya yang dimanfaatkan	80%	-	80,82%	86,30%	106,78%	87,67%	87,67%	109,58%
2. 2 2	0 5 2			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dikembangkan	70%	60%	70%	70%	100%	70%	70%	100%
2. 2 2	0 5 2	2. 0 2		Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dikelola	1 objek	1 objek	1 objek	1 objek	100%	1 objek	1 objek	100%
2. 2 2	0 5 2	2. 0 2	00 01	Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Obyek Cagar Budaya yang Dilindungi	1 objek	1 objek	1 objek	1 objek	100%	1 objek	1 objek	100%
				Tujuan 2 : Meningkatnya daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Indikator 1 : Persentase pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,75%	8,20%	8,25%	11,27%	136,61%	8,25%	8,25%	471,43%
					Indikator 2 : PDRB Pariwisata	12%	15,70%	10,2%	10,88%	106,67%	11%	10,90%	90,83%

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2026) (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
								Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Sasaran 1 : Meningkatnya Kunjungan Wisatawan di Kota Blitar	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kota Blitar	9,66%	32,52%	9,40%	-2,96%	-31,49%	9,52%	9%	93,16%
3. 2 6	0 2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan sarana dan prasarana kawasan pariwisata Makam Bung Karno	65%	30%	30%	30%	100%	65%	65%	100%
3. 2 6	0 2	2. 0 2		Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno yang di kelola	3 kawasan	3 kawasan	3 kawasan	3 kawasan	100%	3 kawasan	3 kawasan	100%
3. 2 6	0 2	2. 0 2	00 04	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100%
3. 2 6	0 2	2. 0 2	00 07	Sub Kegiatan Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	100%	3 lokasi	3 lokasi	100%
					Persentase obyek pariwisata baru yang dikembangkan	50%	50%	50%	50%	100%	50%	50%	100%

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2026) (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
								Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Persentase peningkatan sarana dan prasarana obyek pariwisata	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	100%
					Persentase peningkatan usaha pariwisata	20%	20%	20%	20%	100%	20%	20%	100%
3. 2 6	0 2 1	2. 0 1		Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik	1 destinasi	1 destinasi	1 destinasi	1 destinasi	100%	1 destinasi	1 destinasi	100%
3. 2 6	0 2 1	2. 0 1	00 06	Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	100%	2 lokasi	2 lokasi	100%
3. 2 6	0 2 3	2. 0 3		Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik	1 destinasi	1 destinasi	1 destinasi	1 destinasi	100%	1 destinasi	1 destinasi	100%
3. 2 6	0 2 3	2. 0 3	00 06	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%
3. 2 6	0 3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase destinasi pariwisata baru yang sudah dikunjungi oleh wisatawan	0,13%	0,06%	0,08%	0,06%	100%	0,11%	0,11%	84,61%
3. 2 6	0 3 1	2. 0 1		Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah media promosi pariwisata yang dilakukan	15 media	10 media	11 media	11 media	100%	14 media	14 media	93,34%

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2026) (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
								Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3. 2 6	0 3 1	2. 0 1	00 04	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
3. 2 6	0 3 1	2. 0 1	00 06	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	3 kegiatan	3 kegiatan	100%
3. 2 6	0 3 1	2. 0 1	00 07	Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5 promosi	4 promosi	4 promosi	4 promosi	100%	4 promosi	4 promosi	80%
				Tujuan 2 : Meningkatnya daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Indikator 3 : Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	1,90%	4,59%	4,04%	5,96%	140,84%	4,59%	4,59%	241,57%
				Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Indikator 1 : Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif	0,12%	15,38%	30,8%	30,8%	100%	38,50%	38,50%	32083,33 %
					Indikator 2 : Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang meningkat pendapatannya	0,80%	-	0,50%	0,70%	140%	0,70%	0,70%	87,50%

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2026) (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
								Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3. 2 6	0 5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekraf yang aktif dalam kegiatan	4,5%	3,30%	3,90%	3,90%	100%	4,2%	4,2%	93,33%
3. 2 6	0 5	2. 0 1		Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku Ekraf Yang Ikut Kegiatan	49 orang	49 orang	49 orang	49 orang	100%	49 orang	49 orang	100%
3. 2 6	0 5	2. 0 1	00 06	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	100%	40 orang	40 orang	100%
3. 2 6	0 5	2. 0 1	00 09	Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	9 orang	9 orang	9 orang	9 orang	100%	9 orang	9 orang	100%
				Tujuan 3 : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (83.85)	A (83,60)	A (83,70)	A (85,07)	101%	A (83,75)	A (86,15)	102%
				Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (83.85)	A (83,60)	A (83,70)	A (85,07)	101%	A (83,75)	A (86,15)	102%

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2026) (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
								Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3. 2 6	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83 (angka)	87,23 (angka)	83 (angka)	91,87 (angka)	110,69%	83 (angka)	83 (angka)	100%
3. 2 6	0 1	2. 0 1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3. 2 6	0 1	2. 0 1	00 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100%	10 dokumen	10 dokumen	100%
3. 2 6	0 1	2. 0 1	00 06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	100%	7 laporan	7 laporan	100%
3. 2 6	0 1	2. 0 2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3. 2 6	0 1	2. 0 2	00 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang	41 orang/bul an	41 orang/bul an	41 orang/bul an	100%	41 orang/bulan	41 orang/bulan	100%
3. 2 6	0 1	2. 0 2	00 07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD dan Laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2026) (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
								Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD								
3. 2 6	0 1 5	2. 0 5		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3. 2 6	0 1 5	2. 0 5	00	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	44 paket	1 paket	44 paket	44 paket	100%	44 paket	44 paket	100%
3. 2 6	0 1 5	2. 0 5	00	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	41 orang	41 orang	41 orang	41 orang	100%	41 orang	41 orang	100%
3. 2 6	0 1 6	2. 0 6		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3. 2 6	0 1 6	2. 0 6	00	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	28 paket	28 paket	28 paket	28 paket	100%	28 paket	28 paket	100%
3. 2 6	0 1 6	2. 0 6	00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	4 paket	100%
3. 2 6	0 1 6	2. 0 6	00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	43 paket	43 paket	43 paket	43 paket	100%	2 paket	43 paket	100%

[illegible]

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2026) (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
								Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.2.6	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.2.6	01	2.08	002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
3.2.6	01	2.08	004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	75 laporan	75 laporan	75 laporan	75 laporan	100%	75 laporan	75 laporan	100%
3.2.6	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.2.6	01	2.09	002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	100%	14 unit	14 unit	100%
3.2.6	01	2.09	006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100%	5 unit	5 unit	100%
3.2.6	01	2.09	009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	1 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%

Berdasarkan tabel 2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2023–2025 adalah sebagai berikut:

1. Dari 7 program dan 16 kegiatan yang dilaksanakan pada periode 2023 hingga 2025, tercatat sebanyak 5 program dan 15 kegiatan telah berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan. Kelima program tersebut meliputi Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pembinaan Sejarah, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Keberhasilan pencapaian target ini tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung, antara lain:
 - Pelaksanaan program yang konsisten dan sesuai jadwal tahunan,
 - Koordinasi yang baik antar bidang dan lintas sektor.
 - Dukungan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal, khususnya dalam pengembangan kegiatan berbasis budaya dan ekonomi kreatif,
 - Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung promosi dan pelaporan kegiatan.
 - Monitoring dan evaluasi berkala, yang memungkinkan tindak lanjut cepat terhadap potensi hambatan

Adapun implikasi terhadap target capaian program/kegiatan Renstra Perangkat Daerah adalah bahwa dengan terpenuhinya target kinerja seluruh program dan kegiatan selama periode 2023–2025, dapat disimpulkan capaian Renstra masih berada pada jalur yang tepat (*on track*). Kondisi ini menjadi landasan yang kuat untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

2. Sementara untuk program yang realisasinya belum memenuhi target yang direncanakan, antara lain: Program Pemasaran Pariwisata dengan tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar 84,61%. Program berikutnya yang belum memenuhi target Renstra adalah Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang masih mencapai 93,33%, serta satu kegiatan pada Program Pemasaran Pariwisata yang belum memenuhi target, yaitu Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi, dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang realisasinya masih mencapai 93,33%.

Adapun penyebab belum tercapainya target tersebut adalah karena sebagian indikator kinerja memang direncanakan untuk mencapai target penuh pada akhir periode Renstra, yaitu tahun 2026, sehingga capaian sementara di periode 2023–2025 belum mencapai 100%. Meskipun terdapat beberapa program dan kegiatan yang realisasinya belum mencapai target, hal tersebut tidak memberikan dampak negatif terhadap target capaian program atau kegiatan dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar. Capaian sementara masih menunjukkan tren positif dan berada dalam batas yang wajar sesuai rencana pencapaian bertahap. Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun masih terdapat capaian yang belum maksimal, arah pelaksanaan program tetap sesuai rencana.

Oleh karena itu, baik terhadap program dan kegiatan yang telah memenuhi target maupun yang belum, diperlukan kebijakan serta langkah perencanaan dan penganggaran yang terarah, terukur, dan adaptif. Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai sekaligus mempercepat pencapaian target pada program dan kegiatan yang realisasinya masih di bawah 100%, sehingga ke depan seluruh target kinerja Renstra dapat tercapai secara optimal.

Adapun kebijakan dan langkah perencanaan serta penganggaran yang terarah untuk program atau kegiatan yang telah mencapai target diantaranya:

- **Penguatan inovasi program dan kegiatan** yang relevan dengan potensi lokal serta tren perkembangan sektor kebudayaan dan pariwisata.
- Mempertahankan kinerja dengan menjaga konsistensi pelaksanaan program dan meningkatkan kualitas hasil.
- **Pengembangan kapasitas berkelanjutan** melalui pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi bagi SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata untuk menjaga kualitas pelaksanaan.
- Penganggaran berbasis kinerja dengan memperkuat alokasi anggaran dengan indikator keluaran/hasil yang jelas sehingga keberlanjutan dan peningkatan capaian mendapat prioritas.

Sementara untuk memastikan program dan kegiatan yang belum sesuai target bisa mencapai target yang ada, diperlukan beberapa kebijakan diantaranya

- Melaksanakan identifikasi target tahunan untuk mendukung target capaian akhir renstra
- Meningkatkan pendampingan teknis dan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif
- Mengoptimalkan anggaran untuk kegiatan monitoring dan evaluasi real-time guna mendeteksi dan menindaklanjuti selisih capaian

Dengan penerapan kebijakan dan langkah perencanaan serta penganggaran tersebut, diharapkan program dan kegiatan yang telah mencapai target dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya, sementara program dan kegiatan yang belum sesuai target dapat dicapai sehingga Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar dapat terlaksana secara optimal.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Untuk mengetahui capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dilakukan pengukuran berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Indikator Kinerja ini menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui metode kuantitatif maupun kualitatif, dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), atau dampak (impact). Indikator ini bisa berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya.

Selanjutnya analisis capaian kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, diukur mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang sudah ada.

Secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2026 diharapkan mampu tercapai walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya dan saat ini masih dalam tahun berjalan. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2. sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar

No	Indikator	IKK/ IKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2024)	Tahun (2025)	Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2024)	Tahun (2025)	Tahun (2026)	Tahun (2027)	
		(3)		(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)		(13)
	Indikator tujuan												
1	Persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal		0,99%	1,49%	2,26%	2,48%	1,24%	2,07%	2,64%	3,08%	3,17%	3,25%	Capaian indikator ini mengalami tren positif mulai 2022 hingga 2024 dan capaian kinerja setiap tahunnya telah melebihi target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program pelestarian budaya yang telah dilaksanakan.
2	Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum		0,75%	1,00%	8,25%	8,25%	14,06%	13,17%	11,27%	8,30%	8,35%	8,38%	Capaian indikator ini selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren penurunan secara bertahap. Meskipun terjadi penurunan laju pertumbuhan, realisasi capaian masih berada di atas target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.
3	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif		1,50%	1.60%	4,04%	4,59%	2,55%	4,5%	5,69%	6,06%	6,42%	6,97%	Capaian indikator ini pada tiga tahun terakhir menunjukkan trend kenaikan dan terealisasi diatas target yang ditetapkan. Pada tahun 2025 dan 2026 mendatang diproyeksikan akan mengalami peningkatan capaian diatas target yang telah ditetapkan.
4	PDRB pariwisata		-	10	10,2	11	-	15,70	10,88	11	11,22	11,32	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata menunjukkan tren menurun dari 15,70% pada tahun 2023 menjadi 10,88% di tahun 2024, namun diproyeksikan sedikit meningkat menjadi 11,00% pada tahun 2025. Penurunan pertumbuhan yang cukup tajam antara tahun 2023 dan 2024 mengindikasikan adanya normalisasi pasca lonjakan pemulihan pariwisata. Meskipun demikian, tingkat pertumbuhan tetap positif karena masih melebihi target renstra yang telah ditetapkan.
	Indikator sasaran												
1	Persentase kelompok seni budaya yang aktif	IKU	60%	65%	87,94%	87,24%	70%	87%	88,44%	88,94%	88,94%	90,95%	Capaian indikator ini pada periode 2023-2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan capaian yang konsisten melampaui target. Tahun 2023 dan 2024 menunjukkan peningkatan signifikan,

No	Indikator	IKK/ IKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2024)	Tahun (2025)	Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2024)	Tahun (2025)	Tahun (2026)	Tahun (2027)	
		(3)		(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)		(13)
													masing-masing sebesar 10% dan 22% di atas target. Sementara itu, pada tahun 2025, capaian diproyeksikan melebihi target yang ditetapkan.
2	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Blitar	IKU	9,24%	9,30%	9,40%	9,52%	6,99%	32,52%	-2,96%	9 %	0,03	0,04%	Kinerja indikator ini selama tiga tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2022, capaian tidak memenuhi target dengan realisasi hanya 6,99% , tahun 2023 mencatat lonjakan capaian yang sangat tinggi, mencapai 32,52%, mencerminkan keberhasilan promosi dan pemulihan pascapandemi. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan drastis hingga -2,96%, yang tidak hanya jauh di bawah target tetapi juga menunjukkan tren negatif. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap faktor penurunan, serta perumusan ulang strategi promosi dan penguatan destinasi wisata secara berkelanjutan.
3	Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif	IKU	0,12%	0,12%	30,8%	38,5%	0,24%	15,4%	30,8%	38,5%	46,2%	6,97%	Capaian indikator ini menunjukkan tren kinerja yang sangat positif. Tahun 2022 dan 2023 mencatat realisasi yang jauh melebihi target. Hal ini menunjukkan adanya percepatan dan penguatan aktivitas ekonomi kreatif yang signifikan di Kota Blitar. Pada tahun 2024, realisasi berhasil mencapai target 30,80% secara tepat, yang mengindikasikan bahwa strategi dan program yang dijalankan telah berjalan secara terukur.
4	Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang meningkat pendapatannya		-	-	0,5%	0,7%	-	-	0,70%	0,87%	1,37%	1,52%	Capaian indikator ini telah melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya dampak positif dari program yang ada.
5	Persentase cagar budaya yang dimanfaatkan		-	-	80,82%	78,08%	-	-	86,30%	87,67%	89,04,%	90,41%	Persentase indikator ini pada tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pemanfaatan cagar budaya melalui kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan secara optimal.
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		A(83,60)	A(83,70)	A(86,15)	A(83,80)	A(85,14)	A(85,07)	A(86,15)	A(86,17)	A(85,20)	A(85,24)	Pada indikator ini mengalami peningkatan yang menunjukkan adanya perbaikan

No	Indikator	IKK/ IKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2024)	Tahun (2025)	Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2024)	Tahun (2025)	Tahun (2026)	Tahun (2027)	
		(3)		(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)		(13)
													signifikan dalam penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah selama 3 tahun terakhir. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran capaian, pelaporan, serta evaluasi kinerja yang lebih terstruktur dan berorientasi hasil. Ke depan, penguatan budaya kinerja dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan perlu terus dilakukan agar kualitas akuntabilitas semakin optimal.
	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar												
1	Terlestarikannya cagar budaya	IKK	35,29%	38,24%	41,18%	44,12%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator ini capaian 2024 sudah melebihi target, sehingga tahun 2024 dan 2025 diproyeksikan mengalami peningkatan target diatas renstra
	Urusan Pemerintahan Pilihan												
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	IKK	0,06%	0,12%	9,49%	9,75%	321,42%	328,81%	97,23%	9,75%	9,80%	9,83%	Capaian indikator selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang positif dan konsisten melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, terjadi penyesuaian target secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebagai respons terhadap perubahan kondisi dan proyeksi kinerja yang lebih realistis. Meskipun demikian, realisasi tahun 2024 tetap menunjukkan kinerja yang optimal dengan capaian melebihi target yang direncanakan.
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kota Blitar	IKK	9,20%	9,26%	9,36%	9,47%	699,755%	42,40%	471,35%	9,47%	9,50%	9,53%	Realisasi indikator selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang positif dan konsisten melampaui target yang telah ditetapkan. Terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2022 dan 2023 sebagai efek pemulihan pascapandemi serta hasil dari intensifikasi promosi pariwisata dan penyelenggaraan event strategis. Capaian ini mencerminkan keberhasilan kebijakan yang telah dijalankan, namun tetap diperlukan penyesuaian perencanaan ke depan agar mampu menjaga kesinambungan

No	Indikator	IKK/ IKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2024)	Tahun (2025)	Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2024)	Tahun (2025)	Tahun (2026)	Tahun (2027)	
		(3)		(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)		(13)
													pertumbuhan dan stabilitas sektor pariwisata
3	Tingkat hunian akomodasi	IKK	87,10	87,21	10,29	10,29	10,29%	30,58%	40,00	40,50%	40,85%	40,96%	Realisasi indikator ini menunjukkan tren peningkatan yang positif dan konsisten selama tiga tahun terakhir. Capaian meningkat dari 10,29% pada tahun 2022 menjadi 30,58% di tahun 2023, dan terus naik hingga mencapai 40% pada tahun 2024 mencerminkan perbaikan kualitas layanan akomodasi dan meningkatnya daya tarik destinasi Kota Blitar sebagai tujuan wisata, yang berdampak langsung terhadap kenaikan tingkat hunian.
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap harga berlaku PDRB	IKK	0,75	1	1,25	1,50	35,20%	35,74	5,89%	1,50	1,75	1,79	Indikator ini menunjukkan capaian yang cukup tinggi dan stabil pada tahun 2022 dan 2023, Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang sangat signifikan. Ke depan diperlukan langkah bertahap melalui pengembangan destinasi unggulan dan pemberdayaan pelaku wisata lokal perlu dilakukan untuk menjaga kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	IKK	1,4	1,8	1,9	2,0	6,63%	6,40	8,08%	2,0	2,1	2,2	Pada indikator ini menunjukkan capaian realisasi yang melebihi target setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program pengembangan pariwisata yang tidak hanya berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga berkontribusi positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kinerja sektor pariwisata yang baik turut mendorong pertumbuhan sektor lain seperti perhotelan, kuliner, transportasi, dan ekonomi kreatif, yang secara langsung meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Ke depan, optimalisasi potensi destinasi unggulan, peningkatan kualitas layanan wisata, serta inovasi tata kelola pariwisata perlu terus dilakukan untuk menjaga kontribusi sektor ini terhadap pendapatan daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan tabel 2.2 dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat Perangkat Daerah. Dalam hal ini, IKU Perangkat Daerah merupakan indikator kinerja level impact yang dipilih dari indikator sasaran atau indikator tujuan perangkat daerah sebagai wujud keberhasilan kinerja suatu Perangkat Daerah.

Evaluasi dan analisis capaian pada masing-masing indikator sebagai berikut :

Indikator Tujuan :

1. Indikator Persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal menunjukkan tren positif dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023, realisasi capaian sebesar 2,07%. Selanjutnya, pada tahun 2024, target yang ditetapkan sebesar 2,26% berhasil tercapai sepenuhnya dengan realisasi sebesar 2,64%, yang menunjukkan tingkat capaian mencapai 116,81%. Capaian ini didukung oleh meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian budaya, penguatan kelembagaan budaya, serta adanya program yang berkelanjutan. Untuk tahun 2025, indikator ini diproyeksikan meningkat menjadi 3,08%. Proyeksi ini mempertimbangkan tren capaian sebelumnya, komitmen terhadap pelestarian warisan budaya lokal, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas budaya, dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Indikator Persentase pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2023, realisasi capaian mencapai 8,20%. Kemudian pada tahun 2024, dengan target sebesar 8,25%, realisasi pertumbuhan tercapai sebesar 11,27%, melebihi ekspektasi. Capaian ini didukung oleh pemulihan aktivitas pariwisata, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, serta perbaikan layanan dan infrastruktur sektor akomodasi dan makanan-minuman. Untuk tahun 2025, indikator ini diproyeksikan tetap sebesar 8,25%, dengan mempertimbangkan kemungkinan dampak efisiensi anggaran dan situasi ekonomi daerah yang dapat memengaruhi pertumbuhan sektor ini.
3. Indikator PDRB Pariwisata menunjukkan capaian yang cukup baik dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, realisasi kinerja mencapai 15,70%. Sementara itu, pada tahun 2024, target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja sebesar 10,20% berhasil terlampaui dengan realisasi sebesar 10,88%. Capaian ini didukung oleh meningkatnya aktivitas pariwisata daerah, promosi destinasi secara digital, serta kolaborasi antara pelaku usaha pariwisata dan pemerintah daerah. Untuk tahun 2025, indikator ini diproyeksikan sebesar 11%, dengan asumsi stabilnya pertumbuhan sektor pariwisata dan dukungan kebijakan pemulihan ekonomi berbasis pariwisata.
4. Indikator persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2023, realisasi capaian sebesar 4,59%. Sementara itu, pada tahun 2024, target sebesar 1,60% berhasil terlampaui dengan realisasi mencapai 5,69%. Capaian ini didukung oleh program ekonomi kreatif yang ada di Disbudpar, serta pemanfaatan teknologi dan media digital oleh pelaku ekonomi kreatif. Untuk tahun 2025, indikator ini diproyeksikan meningkat menjadi 6,06%, sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

Indikator Sasaran :

1. Indikator Persentase kelompok seni budaya yang aktif menunjukkan konsistensi kinerja yang baik. Pada tahun 2023, telah terealisasi sebesar 87%. Pada tahun 2024, target sebesar 87,94% berhasil dilampaui dengan realisasi sebesar 88,44%.

Tingkat capaian ini mencerminkan keberhasilan pembinaan dan fasilitasi terhadap kelompok seni budaya di daerah, termasuk dukungan terhadap ruang ekspresi, serta penyelenggaraan kegiatan seni budaya melalui event-event daerah yang diselenggarakan. Sementara tahun 2025, indikator ini diproyeksikan meningkat menjadi 88,94%, seiring dengan penguatan program pemberdayaan kelompok seni budaya dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan.

2. Indikator Persentase cagar budaya yang dimanfaatkan mulai dihitung pada tahun 2024. Pada tahun tersebut, ditetapkan target sebesar 80,82%, dan berhasil direalisasikan sebesar 86,30%. Capaian ini melampaui target dengan tingkat keberhasilan yang signifikan, yang didukung oleh program yang dilaksanakan oleh Disbudpar serta sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku budaya. Untuk tahun 2025, indikator ini diproyeksikan meningkat menjadi 87,67%, dengan asumsi keberlanjutan program terkait pengelolaan cagar budaya.
3. Indikator peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Blitar mengalami fluktuasi dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, realisasi pertumbuhan kunjungan wisatawan cukup tinggi, mencapai 32,52%. Namun, pada tahun 2024, dengan target sebesar 9,40%, realisasi justru menurun hingga -2,96%. Penurunan ini diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:
 - Kurangnya pemenuhan standar dan sertifikasi para pelaku usaha pariwisata.
 - Belum optimalnya penerapan sapta pesona pada destinasi wisata yang ada saat ini.
 - Keterbatasan daya tarik wisata atau belum adanya atraksi yang menarik para wisatawan untuk datang.

Untuk tahun 2025, indikator ini diproyeksikan tumbuh kembali sebesar 9%, seiring dengan rencana penguatan promosi wisata, peningkatan kualitas destinasi, serta kolaborasi dengan pelaku usaha dan komunitas pariwisata.

4. Indikator persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif mengalami lonjakan signifikan. Pada tahun 2023, realisasi masih rendah sebesar 0,12%. Namun pada tahun 2024, target sebesar 30,80% berhasil tercapai sepenuhnya, menunjukkan adanya percepatan pertumbuhan aktivitas ekonomi kreatif. Capaian ini didukung oleh peningkatan fasilitasi kegiatan ekonomi kreatif, dukungan terhadap event lokal, serta keterlibatan komunitas dan pelaku usaha kreatif di berbagai subsektor. Untuk tahun 2025, indikator ini diproyeksikan meningkat lebih lanjut menjadi 38,50%, dengan asumsi terus diperkuatnya program pendukungan, dan kolaborasi lintas sektor.
5. Indikator persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang meningkat pendapatannya mulai dihitung pada tahun 2024. Pada tahun tersebut, ditetapkan target sebesar 0,5% dan berhasil direalisasikan sebesar 0,7%. Capaian ini menunjukkan hasil yang positif dan didukung oleh upaya peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan, promosi produk kreatif lokal, serta pemanfaatan platform digital untuk memperluas akses pasar dan jaringan distribusi. Untuk tahun 2025, indikator ini diproyeksikan sebesar 0,87% meningkat seiring dengan konsistensi dukungan terhadap pelaku ekonomi kreatif serta penguatan ekosistem usaha kreatif di daerah.

6. Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah menunjukkan peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2023, nilai SAKIP mencapai 85,07. Kemudian pada tahun 2024, target sebesar 86,15 berhasil dicapai dengan realisasi yang sama, yaitu 86,15. Capaian ini mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam memperkuat perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara akuntabel. Untuk tahun 2025, nilai SAKIP diproyeksikan meningkat menjadi 86,50, dengan harapan adanya perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan program kegiatan.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Adapun IKK Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Indikator Terlestarikannya cagar budaya menunjukkan capaian yang sangat baik. Pada tahun 2024, realisasi indikator mencapai 100%, jauh melampaui target sebesar 41,18%. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas upaya pelestarian cagar budaya yang dilakukan melalui perlindungan, perawatan, pemanfaatan, serta pelibatan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai budaya. Untuk tahun 2025, indikator ini kembali mencapai 100%, mempertahankan capaian optimal dari tahun sebelumnya. Melihat konsistensi dan keberlanjutan upaya pelestarian, maka pada tahun 2026 indikator ini diproyeksikan tetap dapat mencapai target 100%.
2. Indikator persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan menunjukkan capaian yang sangat tinggi pada tahun 2024. Dari target sebesar 9,49%, realisasi indikator mencapai 97,23%, mencerminkan peningkatan minat wisatawan asing untuk berkunjung ke Kota Blitar yang didukung oleh promosi digital, penguatan daya tarik wisata, dan peningkatan aksesibilitas. Pada tahun 2025, indikator ini kembali menunjukkan capaian positif dengan realisasi sebesar 9,75% sesuai dengan target renstra. Sementara itu, untuk tahun 2026, diproyeksikan indikator ini dapat mencapai 9,87%, dan diasumsikan akan tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra.
3. Indikator persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kota Blitar menunjukkan capaian luar biasa pada tahun 2024. Dari target sebesar 9,36%, realisasi indikator tercapai sebesar 471,35%, menunjukkan lonjakan kunjungan wisatawan domestik yang sangat signifikan. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh peningkatan daya tarik destinasi, penyelenggaraan event budaya, serta promosi pariwisata yang masif melalui berbagai media. Untuk tahun 2025, target ditetapkan sebesar 9,47%, dan telah terealisasi sesuai target yang ditetapkan. Selanjutnya, pada tahun 2026, proyeksi capaian sebesar 9,50% disusun berdasarkan asumsi target yang terdapat pada renstra. Dengan demikian, indikator ini diperkirakan akan tetap sesuai dengan target Renstra yang telah ditetapkan untuk mendukung sasaran pembangunan pariwisata di Kota Blitar.
4. Indikator tingkat hunian akomodasi menunjukkan capaian yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, dari target sebesar 87,33%, realisasi hanya mencapai 40,00%. Demikian pula pada tahun 2025, dari target sebesar 87,47%, realisasi indikator hanya mencapai 40,40%. Untuk tahun 2026, proyeksi realisasi diperkirakan meningkat sedikit menjadi 40,85%. Meskipun demikian, tren realisasi menunjukkan adanya peningkatan bertahap dari tahun ke tahun.

5. Indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan capaian yang sangat baik. Pada tahun 2024, dari target sebesar 1,25%, realisasi justru mencapai 5,89%, menandakan pertumbuhan signifikan dari sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah. Hal ini mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi di sektor pariwisata, termasuk penyediaan jasa akomodasi, kuliner, transportasi wisata, serta produk ekonomi kreatif. Pada tahun 2025, target sebesar 1,50% berhasil tercapai sesuai rencana. Sementara itu, untuk tahun 2026, indikator ini diproyeksikan meningkat menjadi 1,75%, dengan asumsi tren pertumbuhan sektor pariwisata tetap terjaga melalui dukungan program pemerintah, promosi destinasi, serta kolaborasi aktif antara pelaku usaha dan pemerintah daerah. Capaian ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata semakin berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Blitar dan menjadi salah satu sektor unggulan daerah.
6. Indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kinerja yang sangat positif. Pada tahun 2024, dari target sebesar 1,90%, realisasinya mencapai 8,08%, melampaui target secara signifikan. Hal ini mencerminkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi dari sektor pariwisata serta meningkatnya aktivitas usaha pariwisata di Kota Blitar. Pada tahun 2025, target sebesar 2,00% juga berhasil tercapai sesuai rencana. Sementara itu, untuk tahun 2026, indikator ini diproyeksikan meningkat menjadi 2,10%, seiring dengan upaya optimalisasi potensi PAD.

Secara umum, sebagian besar indikator tujuan dan sasaran, termasuk indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK), telah mencapai bahkan melebihi target kinerja yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- Konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan strategis pada sektor kebudayaan dan pariwisata.
- Peningkatan partisipasi masyarakat, khususnya pelaku seni budaya dan ekonomi kreatif, dalam berbagai kegiatan.
- Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial yang efektif dalam promosi budaya dan destinasi wisata.
- Adanya sinergi antara pemerintah dengan pelaku wisata dan pelaku ekonomi kreatif.

Beberapa indikator bahkan menunjukkan lonjakan capaian signifikan, seperti peningkatan perjalanan wisatawan nusantara dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.

Namun demikian, terdapat pula indikator yang belum mencapai target, terutama pada:

- Indikator tingkat hunian akomodasi yang masih di bawah target karena perubahan pola wisata pasca pandemi, keterbatasan pilihan akomodasi, dan daya tarik wisata.
- Persentase peningkatan kunjungan wisatawan ke Kota Blitar, hal ini dikarenakan belum ada pembaruan daya tarik wisata.

Sementara itu capaian indikator yang positif menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masih berada dalam jalur pencapaian Renstra (on track). Implikasi positifnya antara lain:

- Meningkatnya kontribusi sektor budaya dan pariwisata terhadap PAD.
- Terjaganya kontinuitas pelestarian warisan budaya lokal dan peningkatan pendapatan pelaku ekonomi kreatif.
- Meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Meski demikian, adanya indikator yang belum tercapai dapat berdampak pada:

- Terhambatnya pencapaian sasaran strategis secara keseluruhan.
- Ketimpangan antar sektor (misalnya pertumbuhan ekonomi pariwisata tinggi tetapi hunian akomodasi rendah), yang dapat mengganggu konsistensi pencapaian indikator.
- Perlunya evaluasi terhadap efektivitas metode promosi dan program fasilitasi yang sudah dijalankan.

Untuk menjaga keberlanjutan capaian kinerja serta memperbaiki indikator yang belum mencapai target, diperlukan kebijakan dan langkah strategis yang terukur. Beberapa tindakan yang dapat diambil antara lain:

- Penguatan strategi promosi digital dan kolaboratif, dengan melibatkan komunitas lokal, pelaku pariwisata, serta pemanfaatan media sosial secara intensif dan terarah.
- Optimalisasi penganggaran berbasis prioritas, dengan memastikan kegiatan yang berdampak langsung terhadap indikator Renstra tetap didanai secara proporsional.
- Pemantauan rutin dan pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan, guna memastikan efektivitas program yang telah dijalankan.
- Penguatan kemitraan dan sinergi lintas OPD, pelaku ekonomi kreatif, dan pelaku usaha untuk meningkatkan nilai tambah sektor pariwisata dan kebudayaan.
- Penyusunan program pelatihan dan pendampingan bagi pelaku seni budaya dan ekonomi kreatif, guna meningkatkan kapasitas dan daya saing.
- Perbaikan aksesibilitas dan kualitas layanan destinasi wisata, melalui intervensi ringan yang tidak memerlukan anggaran besar, seperti penataan informasi wisata, pengelolaan komunitas sadar wisata, dan penyebaran konten promosi.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi “Kota Blitar KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat”, khususnya pada pelaksanaan misi pertama dan ketiga. Pada misi pertama, yaitu meningkatkan tata kehidupan yang religius, nasionalis, setara gender, dan berkepribadian dalam kebudayaan, Disbudpar berkontribusi melalui pelestarian warisan budaya, pembinaan komunitas seni, dan penyelenggaraan event budaya yang memperkuat identitas lokal. Sementara pada misi ketiga, yakni mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan berbasis potensi lokal, Disbudpar turut mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sejalan dengan hal tersebut, evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah menjadi penting untuk mengukur sejauh mana kontribusi Disbudpar dalam mencapai target-target pembangunan daerah. Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah, serta pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya. Secara umum, capaian indikator kinerja menunjukkan tren yang positif, namun masih terdapat indikator yang belum mencapai target, seperti halnya pada tingkat kunjungan wisatawan di Kota Blitar. Hal ini menjadi perhatian penting karena berdampak pada konsistensi pencapaian sasaran strategis, khususnya dalam mengoptimalkan kontribusi sektor kebudayaan dan pariwisata terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Rendahnya capaian pada indikator tertentu mencerminkan adanya hambatan struktural maupun teknis yang perlu segera diidentifikasi dan ditangani agar tidak menimbulkan penyimpangan lebih lanjut terhadap target yang telah ditetapkan. Untuk itu, penting untuk agar

mengidentifikasi secara lebih rinci berbagai permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Disbudpar, baik dari aspek substansi program maupun dukungan sumber daya. Pemahaman terhadap permasalahan ini menjadi landasan dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih efektif ke depan.

Berdasarkan hasil evaluasi Renja dan capaian Renstra, sejumlah permasalahan utama yang dihadapi Disbudpar Kota Blitar antara lain:

1. Belum optimalnya pembinaan kesenian modern, yang cenderung tertinggal dibandingkan pelestarian kesenian tradisional.
2. Belum adanya tenaga kebudayaan yang memiliki sertifikasi bidang kebudayaan.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana, termasuk ruang pameran, ruang ekspresi seni, dan pemeliharaan situs budaya.
4. Ketidadaan simbol kebudayaan khas Kota Blitar yang dapat merepresentasikan identitas daerah secara visual dan konseptual.
5. Belum tersedianya sistem database kebudayaan dan pariwisata, sehingga terhambatnya pendataan, pemetaan, dan penyusunan program yang berbasis bukti.
6. Pengembangan kawasan wisata unggulan, seperti Istana Gebang, Kawasan PETA, dan Agrowisata Belimbing, belum optimal.
7. Kurangnya promosi dan publikasi destinasi wisata, baik secara digital maupun konvensional.

Berbagai isu tersebut tidak hanya mencerminkan tantangan internal dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Disbudpar, tetapi juga membuka peluang untuk melakukan perbaikan dan penguatan peran strategis sektor budaya dan pariwisata. Oleh karena itu, penting untuk mencermati dampak isu-isu tersebut terhadap pencapaian visi-misi daerah serta kontribusinya terhadap program-program pembangunan nasional. Berbagai isu tersebut berdampak pada hal-hal penting berikut:

1. Masih perlunya optimalisasi kontribusi Disbudpar dalam pencapaian misi daerah, khususnya misi pertama dan ketiga, melalui penguatan peran kebudayaan sebagai fondasi identitas daerah dan pengembangan pariwisata sebagai penggerak ekonomi lokal.
2. Belum maksimalnya dukungan terhadap program pembangunan nasional, antara lain Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pariwisata, pelestarian budaya yang selaras dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) nasional, serta capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama Tujuan 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta Tujuan 11 tentang kota dan permukiman yang inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan.
3. Belum adanya standar dan sertifikasi pelaku wisata, memungkinkan kualitas pelayanan wisata yang tidak konsisten atau di bawah ekspektasi wisatawan, yang berisiko menurunkan tingkat kepuasan dan kunjungan ulang.

Dalam upaya meningkatkan kinerja sektor kebudayaan dan pariwisata, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi secara cermat, diantaranya:

- Digitalisasi pelayanan dan promosi budaya-pariwisata yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.
- Kebutuhan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pelaku usaha, komunitas kreatif, dan akademisi.
- Belum adanya Tim Ahli Cagar Budaya untuk pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kota Blitar
- Belum adanya tenaga kebudayaan yang terserfikasi untuk pelestarian budaya yang lebih berkualitas dan berkelanjutan
- Belum tersedianya Riparda (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah) yang merupakan acuan utama bagi

pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata secara terarah, terpadu, berkelanjutan, dan sesuai dengan potensi lokal.

- Minimnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi, yang berdampak pada kualitas layanan dan pengelolaan destinasi.
- Keterbatasan pendampingan dan sertifikasi bagi pelaku ekonomi kreatif, yang memengaruhi profesionalisme dan daya saing pelaku sektor ini.
- Belum terlaksananya standarisasi dan sertifikasi pelaku usaha pariwisata.
- Belum terfasilitasinya pendaftaran kekayaan intelektual bagi pelaku usaha di Kota Blitar

Di balik berbagai tantangan tersebut, terdapat pula peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong kemajuan sektor budaya dan pariwisata di Kota Blitar secara lebih inovatif dan berkelanjutan.

- Posisi Kota Blitar sebagai salah satu kota sejarah karena adanya Makam Bung Karno Dan Istana Gebang.
- Situasi kota yang tidak macet dan jarak antar tempat wisata yang terjangkau dan mudah , sehingga membuat wisatawan tidak perlu kesulitan terkait transportasi
- Banyaknya hotel atau penginapan dengan harga variatif yang tersedia di area-area strategis dekat tempat wisata untuk memudahkan mobilisasi pengunjung.
- Tersedianya tempat kuliner, rumah makan atau restoran dengan harga terjangkau lokasi yang mudah ditempuh.

Dengan memperhatikan tantangan dan peluang yang ada, maka diperlukan perumusan isu-isu strategis yang akan menjadi dasar penyusunan arah kebijakan dan program pembangunan tahun mendatang.

- Perluasan cakupan pembinaan kesenian, termasuk kesenian kontemporer.
- Peningkatan sarana dan prasarana budaya dan pariwisata yang berstandar layanan publik.
- Pembentukan sistem informasi kebudayaan dan pariwisata terintegrasi.
- Pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana pelayanan publik, publikasi informasi budaya, dan promosi destinasi wisata yang adaptif terhadap tren digital masyarakat.
- Peningkatan kualitas SDM pariwisata dan pelaku usaha dan ekonomi kreatif, baik melalui pelatihan, pendampingan, maupun sertifikasi.
- Standarisasi dan sertifikasi pelaku usaha pariwisata untuk mendorong pelaku usaha pariwisata agar memenuhi standar mutu layanan dan memperoleh sertifikasi sebagai jaminan kualitas bagi wisatawan.
- Peningkatan kapasitas SDM kebudayaan melalui sertifikasi tenaga kebudayaan untuk menjamin mutu pelestarian budaya, penguatan identitas lokal, dan layanan kebudayaan.
- Penyusunan dan implementasi Riparda sebagai arah pembangunan kepariwisataan daerah untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata secara terarah, berkelanjutan, dan sesuai dengan potensi sejarah dan kultural Kota Blitar.
- Penguatan kelembagaan pelestarian budaya, termasuk percepatan pembentukan TACB.
- Fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mendukung legalitas dan perlindungan karya cipta pelaku ekonomi kreatif sebagai bagian dari upaya peningkatan nilai ekonomi dan branding produk lokal.
- Optimalisasi destinasi wisata unggulan dan penataan kawasan strategis wisata berbasis sejarah dan potensi lokal.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2026

Dalam rangka menjamin kesinambungan arah pembangunan serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, penetapan tema dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 menjadi pijakan penting dalam perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Tema pembangunan tahunan dirumuskan sebagai penjabaran dari dokumen RPJMD Kota Blitar Tahun 2025–2029 dan mengacu pada arahan prioritas pembangunan nasional serta prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur, yang kemudian tertuang pada RKPD Kota Blitar tahun 2026. Tema ini bertujuan untuk mencerminkan fokus pembangunan yang akan dicapai dalam satu tahun mendatang, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang selaras lintas sektor dan tingkatan pemerintahan. Berdasarkan pada rancangan awal RKPD Kota Blitar Tahun 2026 maka tema pembangunan Kota Blitar Tahun 2026 adalah “Penguatan Pondasi Transformasi Bidang Pelayanan Dasar Yang Didukung Kualitas SDM dan Infrastruktur Yang Berkelanjutan”.

Adapun prioritas pembangunan daerah tahun 2026 sesuai Rancangan Awal RKPD Kota Blitar Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, serta disesuaikan dengan isu strategis dan kebutuhan daerah. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan prioritas pembangunan daerah dalam kerangka "Nawa Bhakti Satya", yang pada tahun 2026 difokuskan pada beberapa pilar utama seperti Jatim Kerja, Jatim Akses, Jatim Cerdas, dan Jatim Harmoni, Jatim Agro, Jatim Berkah Amanah, Jatim Sejahtera, Jatim Sehat, Jatim Lestari, guna memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis dan inklusif.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Blitar merumuskan prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan arah nasional dan provinsi, yang diarahkan untuk Penguatan Pondasi Transformasi sebagai dasar pembangunan melalui transformasi ekonomi, sosial, lingkungan dan pemerintahan. Penjabaran prioritas ini menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam merancang program, kegiatan, dan sub kegiatan yang responsif terhadap tantangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat Kota Blitar tahun 2026.

Adapun program prioritas Kota Blitar adalah sebagai berikut :

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan inklusif
2. Revitalisasi infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public
4. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan
5. Peningkatan kualitas pendidikan dan Kesehatan

Untuk memastikan keselarasan antara program dan kegiatan perangkat daerah dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan, dilakukan penandaan (tagging) dukungan program berdasarkan prioritas pembangunan di tingkat nasional, provinsi, dan daerah. Proses tagging ini disusun dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, serta memperhatikan keterkaitan langsung antara urusan yang dilaksanakan dengan sasaran pembangunan lintas level pemerintahan.

Urusan kebudayaan misalnya, memiliki peran penting dalam mendukung prioritas nasional yang menekankan pada penguatan nilai-nilai harmoni, toleransi, dan pelestarian budaya dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini juga sejalan dengan prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam agenda Jatim Harmoni, serta mendukung prioritas pembangunan Kota Blitar yang diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, khususnya dalam

membentuk karakter dan jati diri masyarakat melalui penguatan budaya lokal.

Sementara itu, Urusan kepariwisataan berkontribusi terhadap pencapaian prioritas nasional dalam pengembangan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan kewirausahaan, serta industri kreatif dan agromaritim, sebagaimana tertuang dalam RKP 2026. Di tingkat Provinsi Jawa Timur, urusan ini mendukung agenda Jatim Kerja yang berfokus pada perluasan kesempatan kerja. Sedangkan di lingkup Kota Blitar, kontribusi urusan pariwisata diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan inklusif.

Sebagai tindak lanjut dari proses penandaan dukungan program terhadap prioritas pembangunan, dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 melalui persandingan antara usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKPD dengan hasil identifikasi kebutuhan riil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang kemudian tersaji pada Tabel 2.3 berikut ini.

Review ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh rencana kerja perangkat daerah telah selaras dengan tema dan prioritas pembangunan, serta mencerminkan tugas pokok dan fungsi secara utuh.

Kegiatan review ini juga menjadi sarana untuk menilai kecukupan substansi dan konsistensi perencanaan, termasuk mengidentifikasi adanya program/kegiatan/sub kegiatan yang perlu ditambahkan, disesuaikan, atau disempurnakan dalam dokumen perencanaan daerah. Hasil review tersebut disajikan dalam tabel berikut, sesuai dengan format Lampiran 3, yang memuat informasi tentang program/kegiatan/sub kegiatan yang relevan, kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan, serta usulan perbaikan atau penyesuaian yang dibutuhkan.

Pada tingkat nasional, prioritas pembangunan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang mengambil tema **“Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif”**..

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB				1.082.021.080	
	BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN				560.000.000	BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN				1.082.021.080	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kota Blitar	-	-	495.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kota Blitar	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	60,39%	937.335.480	Adanya tambahan dana untuk event daerah yang merupakan proyek strategis daerah
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	-	1 objek	300.000.000	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dikelola	100%	257.124.800	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Blitar	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 objek	50.000.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Blitar	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	4 objek	241.624.800	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kota Blitar	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	9 orang	250.000.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kota Blitar	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	125 orang	15.500.000	
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	-	1 orang	195.000.000	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Tenaga Kebudayaan Yang Mendapatkan Sertifikasi di Bidang Kebudayaan	42 orang	680.210.680	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	10 laporan	195.000.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	12 laporan	680.210.680	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kota Blitar	-	-	65.000.000	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kota Blitar	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	100%	144.685.600	Adanya tambahan dana untuk event daerah yang merupakan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											proyek strategis daerah
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Blitar	-	2,74%	15.000.000	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Cagar Budaya Yang Ditetapkan	1 objek	114.685.600	
	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Kota Blitar	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	1 objek	15.000.000	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Kota Blitar	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	2 objek	114.685.600	
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Blitar	-	1 objek	50.000.000	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola	5 objek	30.000.000	
	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Blitar	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1 objek	50.000.000	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Blitar	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	5 objek	30.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Kota Blitar			9.738.491.340	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Kota Blitar			12.560.652.920	Adanya tambahan dana untuk event daerah yang merupakan proyek strategis daerah
	BIDANG URUSAN PARIWISATA	Kota Blitar			9.738.491.340	BIDANG URUSAN PARIWISATA	Kota Blitar			12.560.652.920	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kota Blitar	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	0,2%	550.000.000	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	0,03%	3.118.923.600	Adanya tambahan dana untuk event daerah yang merupakan proyek strategis daerah
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase objek daya tarik wisata yang sesuai standar	20%	117.000.000	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase objek daya tarik wisata yang sesuai standar	68%	2.160.000.000	
	Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 lokasi	100.000.000	Pengadaan/Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 lokasi	2.160.000.000	
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	2 orang	17.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	2 orang	0	Dialihkan ke sub kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	300.000.000	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota yang dikelola	3 lokasi	943.423.600	
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 unit	35.000.000	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Unit	483.435.500	
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	2 orang	265.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	2 Orang	459.988.100	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah destinasi pariwisata Kabupaten/Kota yang dikelola	1 Dokumen	60.000.000	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah destinasi pariwisata Kabupaten/Kota yang dikelola	3 lokasi	15.500.000	
	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 laporan	50.000.000	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	5.500.000	
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase usaha pariwisata yang memenuhi standar	1 Dokumen	73.000.000	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase usaha pariwisata yang memenuhi standar	63 %	0	Dialihkan ke Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Manuasia Ekonomi Kreatif dan Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi Dunia Usaha
	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	Kota Blitar	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan dan pembinaan dan pengawasan	1 Pelaku Usaha	30.000.000	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	Kota Blitar	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	1 Usaha	0	Dialihkan ke Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Dara Manuasia Ekonomi Kreatif dan Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi Dunia Usaha
	Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko	Kota Blitar	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan dan pembinaan dan pengawasan	1 badan usaha	15.000.000,00	Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko	Kota Blitar	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	1 Pelaku Usaha	0	Dialihkan ke Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Dara Manuasia Ekonomi Kreatif dan Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi Dunia Usaha
	Pelaksanaan Fasilitas Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah	Kota Blitar	Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang di Fasilitas Standarisasi dan Sertifikasi Usahanya	1 badan usaha	28.000.000	Pelaksanaan Fasilitas Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah	Kota Blitar	Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang di Fasilitas Standarisasi dan Sertifikasi Usahanya	1 badan usaha	0	Dialihkan ke Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Dara Manuasia

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Ekonomi Kreatif dan Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi Dunia Usaha
							Kota Blitar				
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kota Blitar	-	-	40.000.000	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kota Blitar	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	0,26 %	136.016.100	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	-	-	40.000.000	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase pariwisata produk yang dipasarkan	2 %	136.016.100	
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 dokumen	15.000.000	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 dokumen	73.016.100	
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 promosi	25.000.000	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 promosi	63.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Persentase Peningkatan Prasarana Ruang Kreatif	0%	167.500.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Kota Blitar	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	0,35 %	678.276.000	Adanya tambahan dana untuk event daerah yang merupakan proyek strategis daerah
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Jumlah produk ekonomi kreatif yang dikembangkan	0 jenis	167.500.000	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kota Blitar	Jumlah produk ekonomi kreatif yang dikembangkan	3 jenis	678.276.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah		Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	1 Lembaga	20.000.000	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Kota Blitar	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	1 Lembaga	24.766.000	
	Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif		Jumlah terlaksanakannya pendudukan pemasaran ekonomi kreatif	1 Promosi	122.500.000,00	Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	Kota Blitar	Jumlah terlaksanakannya pendudukan pemasaran ekonomi kreatif	1 Promosi	646.760.000	Adanya tambahan dana untuk event daerah yang merupakan proyek strategis daerah
	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual		Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	1 produk	25.000.000,00	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Kota Blitar	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Produk	6.750.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kota Blitar	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi yang Dibentuk dan Beroperasi	20%	42.500.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kota Blitar	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi yang Dibentuk dan Beroperasi	22,05 %	222.571.200	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	20%	17.500.000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Blitar	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	63 %	22.571.200	Adanya penyesuaian anggaran
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan	1 orang	17.500.000	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kota Blitar	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan	30 orang	22.571.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif					Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mengembangkan kapasitasnya dengan mengadakan kerjasama		25.000.000	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Kota Blitar	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mengembangkan kapasitasnya dengan mengadakan kerjasama	23 %	200.000.000	
	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha		Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	1 laporan	25.000.000	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	1 laporan	200.000.000	Adanya Tambahan anggaran untuk proyek strategis
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar	-	-	8.938.491.340	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100%	8.404.866.020	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	-	100%	8.651.600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	22.879.300	Adanya penyesuaian anggaran
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	4.948.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen	4.948.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	3.703.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 laporan	3.702.800	
						Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kota Blitar	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	2.750.000	Adanya penyesuaian anggaran untuk sub kegiatan baru

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	10.010.000	Adanya penyesuaian anggaran untuk sub kegiatan baru
						Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Kota Blitar	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara	1.468.000	Adanya penyesuaian anggaran untuk sub kegiatan baru
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar		100%	4.892.485.056	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	4.150.489.039	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang/bulan	4.891.206.356	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang/bulan	4.149.210.339	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	1.278.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	1.278.700	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	-	-	103.026.300	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	82.589.100	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	44 paket	35.300.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	44 paket	0	Tidak diperbolehkan menganggarkan pakaian dinas
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	41 orang	67.726.300	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	41 orang	82.589.100	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Peraturan Perundang-Undangan					Peraturan Perundang-Undangan			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	-	23 laporan	234.205.231	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan umum	8 laporan	242.601.868	Adanya penyesuaian anggaran untuk sub kegiatan baru
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	34.344.100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	30.355.000	Adanya penyesuaian anggaran
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	33.392.900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	33.360.900	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	27.335.287	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	54.913.400	Adanya penyesuaian anggaran
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	39.026.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	35.012.000	Adanya penyesuaian anggaran
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Blitar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	14.629.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Blitar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.622.500	Adanya penyesuaian anggaran
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 dokumen	9.540.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.508.000	Adanya penyesuaian anggaran
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 laporan	70.868.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	93.611.328	Adanya penyesuaian anggaran
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	5.069.444	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.060.300	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	-	2 unit	25.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	110.241.772	Adanya penyesuaian anggaran
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	15.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	114.519.500	Adanya penyesuaian anggaran

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	10.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar		78 laporan	3.512.464.200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	78 Laporan	3.512.463.800	Adanya penyesuaian anggaran
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 laporan	363.936.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	333.936.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	75 laporan	3.148.528.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	75 laporan	3.148.526.600	Adanya penyesuaian anggaran
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100%	162.658.953	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Jumlah laporan pemeliharaan BMD	12 laporan	229.474.053	Adanya penyesuaian anggaran
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Blitar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	13.857.200	Adanya penyesuaian anggaran dan Sub Kegiatan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	75.943.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	66.248.600	Adanya penyesuaian anggaran
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	81.688.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	82.340.300	Adanya penyesuaian anggaran
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	5.027.953	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	67.027.953	

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar telah mengarah pada upaya pencapaian target prioritas pembangunan daerah, baik dalam urusan kebudayaan, pariwisata, maupun ekonomi kreatif. Secara umum terlihat ada perbedaan pagu anggaran pada rancangan Awal RKPD dan Hasil Analisis Kebutuhan. Pada rancangan awal RKPD pagu anggaran sebesar Rp. 10.298.491.340,-, sementara pada hasil analisis kebutuhan terdapat pagu tambahan untuk Kegiatan Strategis Daerah sebesar Rp. 1.700.000.000 sehingga total pagu anggaran pada hasil analisis kebutuhan adalah sebesar Rp. 11.998.491.340,-.

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Pada Tahun 2026, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar tidak menerima usulan program atau kegiatan yang bersumber dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Dengan demikian, tidak terdapat program atau kegiatan yang diakomodasi melalui mekanisme tersebut pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, sebagaimana ditunjukkan pada tabel terlampir.

Tabel 2.4.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kota Blitar

No	Usulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Volume	Catatan
	Musrenbang						
1	nihil						
	Pokir DPRD						
2	nihil						

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 perlu sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah, prioritas daerah harus mendukung prioritas nasional. Prioritas nasional merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden, dimana Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program hasil Terbaik Cepat (PHTC). Prioritas Nasional meliputi:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan arah kebijakan :
2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, dengan arah kebijakan :
3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi dengan arah kebijakan :
4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas, dengan arah kebijakan :
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dengan arah kebijakan:
6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan; pemerataan ekonomi, dengan arah kebijakan:
7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan dengan arah kebijakan:
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur dengan arah kebijakan : .

Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD tahun 2026 perlu mengacu pada Tema RKP Tahun 2026. Sesuai dengan tema RKP Tahun 2026 **“Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif”**. Untuk mewujudkan tema RKP tersebut ditetapkan sasaran makro pembangunan nasional pada tahun 2026, yaitu: 1). Laju Pertumbuhan Ekonomi; 2). PDRB per kapita (juta); 3). Kontribusi PDRB Provinsi; 4). Tingkat Kemiskinan; 5). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); 6). Indeks Rasio Gini; 7). Indeks Modal Manusia; 8). Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK dan 9). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

Sesuai tupoksi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, untuk Urusan Kepariwisataan, Disbudpar mendukung program prioritas nasional 3 yaitu *Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi*. Sementara untuk Urusan Kebudayaan Disbudpar mendukung program Prioritas Nasional 8 yaitu *Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur*.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar mengidentifikasi sejumlah kebijakan dan program pembangunan yang dapat ditindaklanjuti dan diakomodasi dalam perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun perencanaan, yaitu:

1. Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan melalui Program Pengembangan Kebudayaan dan Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya.
2. Peningkatan Kunjungan wisata melalui program Peningkatan Daya tarik destinasi Wisata dan Program Pemasaran Pariwisata
3. Peningkatan Ekonomi Kreatif melalui program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2026 dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang baru mulai berlaku. Tujuan dan sasaran tersebut disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, serta berorientasi pada pencapaian arah kebijakan pembangunan Kota Blitar sebagaimana dirumuskan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026.

Proses perumusan juga mempertimbangkan keselarasan dengan Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2026, khususnya: Prioritas Nasional 3 terkait pengembangan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, kewirausahaan, dan ekonomi kreatif, serta Prioritas Nasional 8 terkait penguatan nilai budaya dan harmonisasi sosial.

Tujuan dirumuskan sebagai arah jangka menengah yang mencerminkan kontribusi Dinas dalam mengembangkan sektor kebudayaan dan pariwisata secara berkelanjutan. Sasaran ditetapkan sebagai penjabaran tujuan yang lebih spesifik dan terukur, yang menjadi dasar penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026.

Perumusan ini juga mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, capaian indikator strategis, serta isu-isu aktual yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan urusan kebudayaan dan kepariwisataan. Adapun Tujuan Sasaran dan indikator kinerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar sebagaimana tabel terlampir :

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2026

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Realisasi					KET
					2023	2024	2025	2026	2027	
	TUJUAN									
1.	Terwujudnya Kota Yang Berkebudayaan Maju Dan Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1. Indeks Pelestarian Budaya	Indeks Pelestarian Kebudayaan (IPK) Kota Blitar adalah ukuran terstruktur untuk menilai capaian pelestarian budaya lokal melalui tiga dimensi utama, yaitu Pelindungan Objek Budaya, Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Budaya, serta Regenerasi dan Keberlanjutan Budaya	Indeks Pelestarian Kebudayaan = Nilai Dimensi Pelindungan Objek Budaya ditambah Nilai Dimensi Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Budaya, ditambah nilai Dimensi Regenerasi dan Keberlanjutan Budaya	N/A	N/A	50,29	86,14	86,98	IKU
		2. Nilai PDRB (ADHB) Sektor Pariwisata pada tahun berjalan/ berlaku	Nilai PDRB (ADHB) Sektor Pariwisata adalah PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum berdasarkan ADHB dalam Milyar rupiah, yang bersumber dari BPS (Kota Blitar dalam Angka pada tahun berjalan)	Nilai PDRB (ADHB) dari BPS (Kota Blitar Dalam Angka pada tahun berjalan)	N/A	540,9 5	540,9 5	573,4 0	610,6 5	
	SASARAN									
1.	Terwujudnya peringkat warisan budaya	Persentase warisan budaya berperingkat nasional	Warisan budaya berperingkat nasional adalah Warisan budaya tak benda yang terdaftar dalam register nasional dan cagar budaya berperingkat nasional	Persentase tahapan / alur/ proses WBTB maupun Cagar Budaya menuju peringkat Nasional	N/A	0	5%	25%	50%	
2.	Meningkatnya investasi pariwisata dan ekonomi kreatif	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi Makan Minum	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, dan Minum adalah persentase peningkatan nilai investasi tahunan pada subsektor penyediaan akomodasi serta kegiatan makan dan minum,	Pertumbuhan Investasi (%) = (Nilai Investasi Tahun N - Nilai Investasi Tahun N-1) dibagi Nilai Investasi Tahun N-1 dikali 100%	N/A	0	0,07%	0,07%	0,07%	IKU

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan		Realisasi		Target		KET
					2023	2024	2025	2026	2027	
			yang tercatat secara resmi melalui sistem perizinan berusaha.							
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan sekretariat sesuai PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017 atau aturan lain yang berlaku pada aplikasi e-Sukma	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun berjalan pada aplikasi e-sukma		91,87	84,90	85	85,30	

Untuk pencapaian tujuan sasaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar dibutuhkan Strategi dan kebijakan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah dan target kinerja hasil (Outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar. Strategi dan Kebijakan dalam Renstra Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar bagi setiap program. Adapun Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar

Visi	Kota Blitar Yang Maju, Sehat Dan Sejahtera Menuju Kota Masa Depan			
Misi 4	Mengembangkan potensi pendidikan, pemuda dan perempuan sebagai generasi emas yang cerdas dan berkarakter			
Misi 5	Mewujudkan pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata dan Industri yang berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Terwujudnya kota berkebudayaan maju dan Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif dan	1. Terwujudnya peringkat warisan budaya (IKU)	Mengoptimalkan pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan warisan budaya sebagai identitas daerah.	Melaksanakan inventarisasi, pendokumentasian, dan penetapan warisan budaya daerah.	1. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
		Mengembangkan kelembagaan, regulasi, dan tata kelola pengelolaan cagar budaya yang berkelanjutan.	Melakukan konservasi, revitalisasi, dan pengelolaan cagar budaya secara profesional dan berkesinambungan.	
		Mendorong partisipasi masyarakat, komunitas budaya, dan generasi muda dalam pemajuan kebudayaan.	- Memberdayakan komunitas seni, adat, dan budaya melalui fasilitasi kegiatan pelestarian serta festival budaya. - Mengembangkan ruang ekspresi dan sarana prasarana kebudayaan yang representatif	2. Program Pengembangan Kebudayaan
		Mengintegrasikan warisan budaya dalam pembangunan daerah, pariwisata, dan pendidikan.	- Meningkatkan promosi, diplomasi budaya, dan kerja sama lintas daerah/nasional untuk mengangkat nilai warisan budaya Kota. - Memperkuat kapasitas SDM dan kelembagaan pelestarian kebudayaan	
	2. Meningkatnya pengeluaran wisatawan (IKU)	Meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata melalui pengembangan produk wisata unggulan berbasis potensi lokal	Revitalisasi, Pelembagaan Dan Penyelenggaraan KSP/Kawasan Strategis Pariwisata, Destinasi dan Daya Tarik Wisata/ DTW Yang	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Visi	Kota Blitar Yang Maju, Sehat Dan Sejahtera Menuju Kota Masa Depan			
Misi 4	Mengembangkan potensi pendidikan, pemuda dan perempuan sebagai generasi emas yang cerdas dan berkarakter			
Misi 5	Mewujudkan pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata dan Industri yang berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
			menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar melalui : • Pembentukan Regulasi dan Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA) kota Blitar 2025-2045 dalam rangka pelaksanaan kewenangan atribusi yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan (penyelenggaraan urusan pilihan Pemerintah Daerah di Bidang Pariwisata) • Pengembangan atraksi, amenities (sarana prasarana), dan aksesibilitas destinasi wisata unggulan terutama KSP dan DTW Tematik Kebangsaan Bung Karno (MBK, Perpustakaan dan Istana Gebang) dalam rangka pelaksanaan tahapan prioritas pembangunan RPJMD 2025-2030	
		• Memperluas jangkauan pemasaran pariwisata Berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi dan media digital.	Penguatan Pemasaran Pariwisata Berkelanjutan melalui : • Peningkatan, Pelembagaan dan optimalisasi system Digital Marketing dalam rangka penguatan Brand Awareness Destinasi dan DTW secara nasional dan internasional • Peningkatan kualitas promosi pariwisata berbasis digital dan penyelenggaraan event kreatif	2. Program Pemasaran Pariwisata

Visi	Kota Blitar Yang Maju, Sehat Dan Sejahtera Menuju Kota Masa Depan			
Misi 4	Mengembangkan potensi pendidikan, pemuda dan perempuan sebagai generasi emas yang cerdas dan berkarakter			
Misi 5	Mewujudkan pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata dan Industri yang berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
		Mendorong kolaborasi multipihak dalam pengembangan pariwisata bersinergi dengan ekonomi kreatif berkelanjutan	- Penguatan kemitraan dengan pelaku usaha bidang pariwisata, komunitas/ insan/ kelompok penggiat pariwisata, dan akademisi untuk mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan. - Pengembangan sumberdaya Pariwisata Berkelanjutan melalui pembentukan dan penyelenggaraan Badan Promosi Pariwisata Daerah/ BPPD yang terukur, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan - Peningkatan kapasitas (Capacity Building) SDM bidang pariwisata dalam rangka resiliensi dan optimalisasi daya saing local, nasional dan global	3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		Meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontinuitas ekosistem ekonomi kreatif	- Pembentukan Regulasi dan Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Daerah kota Blitar 2026-2046 sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Ekonomi Kreatif - Penguatan Pemasaran Produk ekonomi kreatif Berkelanjutan melalui pembentukan serta penyelenggaraan Badan Layanan Umum Ekonomi Kreatif atau dengan nama lainnya berbasis potensi unggulan lokal yang terukur, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan	4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Visi	Kota Blitar Yang Maju, Sehat Dan Sejahtera Menuju Kota Masa Depan			
Misi 4	Mengembangkan potensi pendidikan, pemuda dan perempuan sebagai generasi emas yang cerdas dan berkarakter			
Misi 5	Mewujudkan pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata dan Industri yang berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
			• Fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku ekonomi kreatif. • Peningkatan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif melalui lomba kompetensi, pendampingan Capacity Building, pelatihan dan sertifikasi	
	Meningkatnya kualitas pelayanan Penunjang perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah Sesuai standart pelayanan	- Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah - Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku - Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasaran pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan sebagaimana tersaji pada tabel 3.2, langkah selanjutnya adalah menetapkan ukuran kinerja yang dapat menjadi acuan dalam mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Ukuran kinerja tersebut dituangkan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berfungsi untuk memastikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar.

IKK disusun secara selaras dengan indikator sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Blitar, sehingga dapat memberikan gambaran yang terukur mengenai kontribusi Dinas dalam pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Adapun Indikator Kinerja Kunci Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2026 – 2027

No	IKK	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Realisasi		Target	
				2024	2025	2026	2027
	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
1	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	Dilestarikan adalah telah ditetapkan, dilindungi dikembangkan dan dimanfaatkan	(Jumlah Cagar budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan / Jumlah Cagar budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan) x 100 %	0	0	100%	100%
2	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	Cagar Budaya (CB) Dan warisan Budaya Tak benda (WBTB) yang ditetapkan adalah CB dan WBTP yang telah ditetapkan melalui rekomendasi. Rekomendasi CB adalah melalui Sidang penetapan oleh TACB dan memenuhi kriteria sesuai UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Rekomendasi WBTB adalah sesuai dengan kriteria pada aturan UU No 5 Tahun 2017 tentang Objek Pemajuan Kebudayaan.	(Jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda meliputi Jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya ditambah Jumlah rekomendasi penetapan WBTB / Jumlah rekomendasi Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda meliputi Jumlah rekomendasi Cagar Budaya ditambah jumlah rekomendasi WBTB) x 100%	0	0	14,29%	28,57%
3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang kebudayaan	Tenaga kebudayaan adalah individu atau kelompok (seniman, budayawan, sejarawan, tenaga ahli pelestari CB, arkeolog, juru pelihara) yang terdaftar pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang aktif dan memiliki kompetensi. Tenaga kebudayaan yang disertifikasi dan lulus sertifikasi adalah tenaga kebudayaan yang mendapat peningkatan kapasitas melalui : pelatihan, sertifikasi profesi, bimtek, dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan Kota	(Jumlah tenaga kebudayaan yang disertifikasi dan lulus sertifikasi / Jumlah Tenaga Kebudayaan) x 100%	0	0	19,72%	19,72%

No	IKK	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Realisasi		Target	
				2024	2025	2026	2027
	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
1	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	Mengukur investasi pada sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum yang tidak selalu konstan dan bervariasi	Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum Tahun N dikurangi Investasi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Tahun N-1 dibagi Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum Tahun N-1 dikali 100%	0	0,07%	0,07%	0,07%
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	Tamu Wisatawan Asing adalah tamu wisatawan mancanegara yang melakukan perjalanan wisata berkunjung ke Kota Blitar dengan tujuan rekreasi atau liburan	Jumlah tamu wisatawan mancanegara Tahun N dikurangi Jumlah tamu wisatawan mancanegara Tahun N-1 dibagi Jumlah tamu wisatawan mancanegara Tahun N-1 dikali 100%	0	3,75%	3,97%	4,17%
3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	Individu atau badan usaha yang menciptakan karya atau produk kreatif dan kemudian mendaftarkannya sebagai hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, merek, paten, dan desain industri.	Identifikasi Pelaku Ekraf yang sudah memiliki Kekayaan Intelektual berdasarkan Sub Sektor Ekonomi Kreatif dibagi Jumlah pelaku ekonomi kreatif dikali 100%	0	0,17%	0,35%	0,52%

3.3 Program dan Kegiatan

- Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor penting yang sesuai dengan tugas dan fungsi dinas, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi, dan daerah. Faktor-faktor tersebut antara lain:
- Arah kebijakan dan prioritas nasional, terutama Prioritas Nasional 3 dan 8 dalam RKP Tahun 2026 yang terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata, serta pelestarian nilai budaya.
 - Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Kota Blitar, sebagaimana tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2026.
 - Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025–2029, sebagai dasar utama dalam menentukan arah program dan kegiatan tahunan.
 - Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya dalam urusan kebudayaan.
 - Dukungan terhadap agenda Reformasi Birokrasi Tematik, seperti penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, dan penggunaan produk dalam negeri (P3DN).
 - Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang relevan, seperti penguatan budaya lokal, inklusi sosial, dan pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.
 - Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, termasuk rekomendasi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
 - Pengarusutamaan gender (PUG) dan penyusunan program yang inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar pada Tahun 2026 melaksanakan 7 Program, 19 Kegiatan, 46 Sub Kegiatan. Dan untuk rincian daftar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2026 terlampir pada Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3.
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2026

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2					3	4	5
						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	2	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
1	2	2	0			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Mendukung astachita, Tusi, IKK, LKJIP
	2	2	0	2.		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dikelola	Mendukung astachita, Tusi, IKK, LKJIP
	2	2	0	2.	0	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Mendukung astachita, Tusi, IKK, LKJIP
	2	2	0	2.	0	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Mendukung astachita, Tusi, IKK, LKJIP

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2					3	4	5
					0 2			
	2	2	0	2.		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kebudayaan Yang Mendapatkan Sertifikasi di Bidang Kebudayaan	Mendukung astachita, Tusi, IKK, LKJIP
	2	2	0	2.	0	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Mendukung astachita, Tusi, IKK, LKJIP
					2			
2	2	2	0	5		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Mendukung astachita, Tusi, IKK, LKJIP
	2	2	0	2.		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Yang Ditetapkan	Mendukung astachita, Tusi, IKK, LKJIP
					1			
	2	2	0	2.	0	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	Mendukung astachita, Tusi, IKK, LKJIP
					0			
					1			
					3			
	2	2	0	2.		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola	Mendukung astachita, Tusi, IKK, LKJIP
					2			
	2	2	0	2.	0	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Mendukung astachita, Tusi, IKK, LKJIP
					0			
					0			
					1			
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
	3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
		6						
4	3	2	0			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Mendukung Tusi, IKK, LKJIP
		6	2					
	3	2	0	2.		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase objek daya tarik wisata yang sesuai standar	Mendukung Tusi, IKK, LKJIP
		6	2	0				
				1				
	3	2	0	2.	0	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Mendukung Astacita, Tusi, IKK, LKJIP
		6	2	0	0			
				1	0			
				5				
	3	2	0	2.		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota yang dikelola	Mendukung Tusi, IKK, LKJIP
		6	2	0				
				2				
	3	2	0	2.	0	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Mendukung Tusi, IKK, LKJIP
		6	2	0	0			
				2	0			
				4				
	3	2	0	2.	0	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Mendukung Astacita Tusi, IKK, LKJIP
		6	2	0	0			
				2	0			
				8				
	3	2	0	2.		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata Kabupaten/Kota yang dikelola	Mendukung Tusi, IKK, LKJIP
		6	2	0				
				3				
	3	2	0	2.	0	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Mendukung Astacita Tusi, IKK, LKJIP
		6	2	0	0			
				3	0			
				2				
	3	2	0	2.	0	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Mendukung Tusi, IKK, LKJIP
		6	2	0	0			
				3	0			
				6				
	3	2	0	2.		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha pariwisata yang memenuhi standar	Mendukung Tusi, IKK, LKJIP
		6	2	0				
				4				
	3	2	0	2.	0	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	Mendukung Tusi, IKK, LKJIP
		6	2	0	0			
				4	1			
				0				
	3	2	0	2.	0	Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	Mendukung Tusi, IKK, LKJIP
		6	2	0	0			
				4	1			
				5				
	3	2	0	2.	0	Pelaksanaan Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah	Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang di Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Usahanya	Mendukung Tusi, IKK, LKJIP
		6	2	0	1			
				4	1			
				6				

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2					3	4	5
5	3	2	0			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Mendukung Tusi, IKK, LKJIP
	3	2	0	2.		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase produk pariwisata yang dipasarkan	Mendukung Tusi, IKK, LKJIP
	3	2	0	0	0	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Mendukung Tusi, IKK, LKJIP
	3	2	0	2.	0	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Mendukung Tusi, IKK, LKJIP
6	3	2	0			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	Mendukung Tusi, IKK, LKJIP
	3	2	0	2.		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah produk ekonomi kreatif yang dikembangkan	Mendukung Tusi, IKK, LKJIP
	3	2	0	2.	0	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Mendukung Astacita Tusi, IKK, LKJIP
	3	2	0	2.	0	Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah terlaksanakannya pendudukan pemasaran ekonomi kreatif	Mendukung Tusi, IKK, LKJIP
	3	2	0	2.	0	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Mendukung Astacita Tusi, IKK, LKJIP
7	3	2	0			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi yang Dibentuk dan Beroperasi	Mendukung Tusi, IKK, LKJIP
	3	2	0	2.		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	Mendukung Tusi, IKK, LKJIP
	3	2	0	2.	0	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Mendukung Tusi, IKK, LKJIP
	3	2	0	2.		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mengembangkan kapasitasnya dengan mengadakan kerjasama	Mendukung Tusi, IKK, LKJIP
	3	2	0	2.	0	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Mendukung Tusi, IKK, LKJIP
3	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	Mendukung tusi perangkat daerah
	3	2	0	2.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Mendukung tusi perangkat daerah
	3	2	0	2.	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mendukung tusi perangkat daerah
	3	2	0	2.	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mendukung tusi perangkat daerah
	3	2	0	2.	0	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Mendukung tusi perangkat daerah
	3	2	0	2.	0	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan	Mendukung tusi perangkat daerah

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2					3	4	5
						Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	3	2	0	2.	0	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Mendukung tusi perangkat daerah
	3	2	0	2.	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Mendukung tusi perangkat daerah
	3	2	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Mendukung tusi perangkat daerah
	3	2	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Mendukung tusi perangkat daerah
	3	2	0	2.	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Mendukung tusi perangkat daerah
	3	2	0	2.	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Mendukung tusi perangkat daerah
	3	2	0	2.	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mendukung tusi perangkat daerah
	3	2	0	2.	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan umum	Mendukung tusi perangkat daerah
	3	2	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Mendukung tusi perangkat daerah
	3	2	0	2.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Mendukung tusi perangkat daerah
	3	2	0	2.	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Mendukung tusi perangkat daerah
	3	2	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Mendukung tusi perangkat daerah
	3	2	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Mendukung tusi perangkat daerah
	3	2	0	2.	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Mendukung tusi perangkat daerah
	3	2	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mendukung tusi perangkat daerah
	3	2	0	2.	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mendukung tusi perangkat daerah
	3	2	0	2.	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Mendukung tusi perangkat daerah
	3	2	0	2.	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Mendukung tusi perangkat daerah
	3	2	0	2.	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Mendukung tusi perangkat daerah

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2					3	4	5
					1 0		Bangunan Lainnya yang Disediakan	
	3	2 6	0 1	2. 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mendukung tusi perangkat daerah
	3	2 6	0 1	2. 0 8	0 0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Mendukung tusi perangkat daerah
	3	2 6	0 1	2. 0 8	0 0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Mendukung tusi perangkat daerah
	3	2 6	0 1	2. 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan BMD	Mendukung tusi perangkat daerah
	3	2 6	0 1	2. 0 9	0 0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Mendukung tusi perangkat daerah
	3	2 6	0 1	2. 0 9	0 0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Mendukung tusi perangkat daerah
	3	2 6	0 1	2. 0 9	0 0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Mendukung tusi perangkat daerah
	3	2 6	0 1	2. 0 9	0 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Mendukung tusi perangkat daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya, pada sub bab ini disajikan uraian garis besar mengenai rencana program, kegiatan, indikator, lokasi, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif untuk Tahun 2026, disertai prakiraan maju Tahun 2027. Rencana tersebut disusun dengan memperhitungkan capaian kinerja sebelumnya, tantangan yang teridentifikasi, serta kebutuhan strategis untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar. Selain itu, perumusan program kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar tahun 2026 juga mengacu pada langkah-langkah konkret dalam menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja, yang terdapat pada Langkah perbaikan LKJIP 2024 sebagaimana tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1.
Rencana Tindak Lanjut LKjIP Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2024
Pada Renja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2026

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Mengoptimalkan sosialisasi pengenalan budaya lokal kepada masyarakat terutama generasi penerus	● Melaksanakan pembinaan kepada generasi muda melalui kegiatan atau event daerah misalnya Peringatan PETA Blitar ataupun Grebeg Pancasila	- Program Pengembangan Kebudayaan - Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
2	Pemenuhan pengadaan Tim Ahli Cagar Budaya	● Mengajukan permintaan untuk proses diklat kepada Lembaga atau pihak yang berwenang ● Mengusulkan pembentukan TACB Kota Blitar ● Mengkoordinasikan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Timur terkait proses penetapan ODCB ● Mencantumkan obyek diduga cagar budaya dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Blitar	- Program Pembinaan sejarah - Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam daerah Kabupaten Kota - Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya manusia dan Lembaga Sejarah Lokal kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan sejarah - Program Pelestarian dan pengelolaan cagar Budaya - Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringat Kabupaten/ Kota - Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya
3	Menginventarisasi dan validasi Obyek Diduga Cagar Budaya (ODCB) untuk proses mengajukan penetapan dan regrestasi cagar budaya guna pengambilan kebijakan daerah terkait dengan pelaksanaan pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya	● Mengajukan Tim Ahli Cagar budaya ● Melaksanakan Penyusunan Naskah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) tahun 2024	- Program Pelestarian dan pengelolaan cagar Budaya - Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringat Kabupaten/ Kota - Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya - Program Pembinaan sejarah - Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam daerah Kabupaten Kota - Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya manusia dan Lembaga Sejarah Lokal kabupaten/Kota

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
			- Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan sejarah
4	Mengoptimalkan penertiban layanan kartu induk kesenian	Melaksanakan kunjungan dan monitoring aktifitas kelompok seni budaya	- Program Pengembangan Kebudayaan - Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
5	Secara berkala melaksanakan tradisi budaya	• Membuat jadwal pergelaran periodik dan menyediakan ruang untuk berkreasi terhadap kelompok seni budaya • Melibatkan kelompok seni budaya dalam pelaksanaan event budaya	- Program Pengembangan Kebudayaan - Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
6	Meningkatkan Monitoring atau pembinaan pengawasan KBLI kepada pelaku usaha pariwisata untuk menyesuaikan standar perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	• Melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha pariwisata secara berkala • Melaksnakan sosialisasi terkait KBLI dan perizinan	- Program pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar - Sub kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
7	Melaksanakan sinergitas dan pelatihan ekonomi kreatif	• Melaksanakan pelatihan pengembangan produk kreatif • Mengadakan event untuk pelaku ekonomi kreatif seperti bale latar fest yang bekerja sama dengan pokdarwis • Melaksanakan peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui lomba kampung kreatif	- Program pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar - Sub kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
8	Menambah sumber daya pendukung	• Menambah spot baru di area musem Peta	- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	daya Tarik wisata dan optimalisasi sarana prasarana destinasi dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengunjung	yakni Pojok Kopi sebagai sarana kuliner jadul bagi pengunjung wisata • Meningkatkan promosi melalui media social • Menyelenggarakan pagelaran music/seni secara berkala di Area Museum PETA blitar	- Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota - Sub kegiatan : Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota - Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota - Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota
9	Mereviu Kembali relevansi rumusan formulasi perhitungan capaian kinerja yang kurang tepat	• Menyusun formulasi baru yang lebih tepat dan relevan	- Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten /kota - Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10	Melakukan penetapan target tahun berikutnya berdasarkan pada perhitungan dengab mempertimbangkan realisasi capaian kinerja tahun	• Melakukan evaluasi kinerja tahun sebelumnya • Melakukan rapat koordinasi untuk penetapan target baru	- Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten /kota - Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	sebelumnya serta hal – hal lain terkait penetapan target	Menyusun Dokumen perencanaan yang mengakomodasi target baru	- Sub kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
11	Melengkapi capaian kinerja dengan data kinerja yang relevan dan cukup	- Melakukan pengumpulan data kinerja - Melakukan pemanfaatan data untuk perencanaan tahun berikutnya	- Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten /kota - Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
12	Mengoptimalkan pemanfaatan rekomendasi hasil evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja sehingga efektivitas dan efisiensi kinerja dapat terwujud	Menyusun Rencana Aksi Perbaikan Berdasarkan Rekomendasi	- Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten /kota - Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
13	Mengoptimalkan pengelolaan data pelaku ekonomi kreatif	Melakukan survey pendataan pelaku ekonomi kreatif	- Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten /kota - Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Mengacu pada langkah perbaikan yang tercantum dalam LKJIP Tahun 2024 serta hasil analisis pada bab-bab sebelumnya, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar memuat usulan pelaksanaan 7 program, 19 kegiatan, dan 46 sub kegiatan. Usulan ini disusun untuk mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah dengan mempertimbangkan kesinambungan capaian, efektivitas sumber daya, dan kebutuhan penguatan sektor kebudayaan serta pariwisata.

Selanjutnya, masing-masing program dan kegiatan tersebut diuraikan secara rinci, meliputi indikator kinerja, lokasi pelaksanaan, kerangka pendanaan indikatif Tahun 2026, serta prakiraan maju Tahun 2027 sebagai acuan kesinambungan program pada tahun berikutnya, sebagaimana disajikan pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2.
Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
Dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kota Blitar

Nama PD : Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				13.642.674.000,00				13.783.078.929,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.082.021.080,00				1.098.034.992,00	
2	2	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1.082.021.080,00				1.098.034.992,00	
2	2	0			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan		60,39 %	937.335.480,00			62.80%	951.208.045,00	
2	2	0	2.0		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dikelola		100 % persen	257.124.800,00			100%	260.930.247,00	
2	2	0	2.0	00	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan									
						Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	4 Objek	241.624.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Objek	245.200.847,00	
2	2	0	2.0	00	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan									
						Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	125 Orang	15.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		130 Orang	15.729.400,00	
2	2	0	2.0		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kebudayaan Yang Mendapatkan Sertifikasi di Bidang Kebudayaan		42 orang	680.210.680,00			42 orang	690.277.798,00	
2	2	0	2.0	00	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional									

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	680.210.680,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	690.277.798,00
2	2	0			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan		100 % undefined	144.685.600,00			100 % undefined	146.826.947,00
2	2	0	2.0		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Yang Ditetapkan		1 Objek	114.685.600,00			2 objek	116.382.947,00
2	2	0	2.0	00	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda								
						Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Objek	114.685.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Objek	116.382.947,00
2	2	0	2.0		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola		5 Objek	30.000.000,00			5 objek	30.000.000,00
2	2	0	2.0	00	Pelindungan Cagar Budaya								
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Objek	30.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Objek	30.000.000,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				12.560.652.920,00				12.746.550.583,00
3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				12.560.652.920,00				12.746.550.583,00
3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku		100 %	8.404.866.020,00			100 %	8.529.257.037,00
3	2	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 %	22.879.300,00			100%	23.217.913,00
3	2	0	2.0	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan	12 Dokumen	4.948.500,00	DANA ALOKASI		12 Dokumen	4.948.500,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							, Semua Kel/Desa			UMUM (DAU)			
3	2	0	2.0	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	6	1	1	07		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Laporan	3.702.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.702.800,00
3	2	0	2.0	00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah								
	6	1	1	09		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Data	2.750.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.750.000,00
3	2	0	2.0	00	Pelaksanaan Forum Perangkat daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
	6	1	1	10		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Berita Acara	10.010.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			10.010.000,00
3	2	0	2.0	00	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat Dan daerah Dalam rangka mendukung target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan								
	6	1	1	13		Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Berita Acara	1.468.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.468.000,00
3	2	0	2.0		Administrasi keuangan perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100 %	4.150.489.039,00			100%	4.150.489.039,00
3	2	0	2.0	00	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN								
	6	1	2	01		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41 Orang/bulan	4.149.210.339,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		41 Orang/bulan	4.149.210.339,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	2	0	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
6	1	2		07		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	1.278.700,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.278.700,00
3	2	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	82.598.100,00			100%	82.598.100,00
6	1	5			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
3	2	0	2.0	00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41 Paket	0	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		41 Paket	0
6	1	5		10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41 Orang	82.598.100,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		41 Orang	82.598.100,00
3	2	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan umum		8 Laporan	242.601.868,00			23laporan	242.601.868,00
6	1	6			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
3	2	0	2.0	00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	30.355.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	30.355.000,00
6	1	6		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	33.360.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	33.360.900,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	2	0	2.0	00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
	6	1	6	03		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	54.913.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Paket	54.913.400,00
3	2	0	2.0	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
	6	1	6	04		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	35.012.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Paket	35.012.000,00
3	2	0	2.0	00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
	6	1	6	05		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	14.622.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	14.622.500,00
3	2	0	2.0	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
	6	1	6	06		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.508.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	5.508.000,00
3	2	0	2.0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	6	1	6	09		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Laporan	93.611.328,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Laporan	93.611.328,00
3	2	0	2.0	00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
	6	1	6	10		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.060.300,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	5.060.300,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	2	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		2 Laporan	110.241.772,00			2unit	110.241.772,00
3	2	0	2.0	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
				06		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	1 Unit	114.519.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	114.519.500,00
3	2	0	2.0	00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
				10		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	1 Unit	50.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	50.000.000,00
3	2	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		78 Laporan	3.512.463.800,00			78 laporan	3.512.463.800,00
3	2	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
				02		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	12 Laporan	333.936.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	333.936.000,00
3	2	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
				04		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	78 Laporan	3.148.526.600,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		78 Laporan	3.148.526.600,00
3	2	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan BMD		12 Laporan	229.474.053,00			12 laporan	229.474.053,00
3	2	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
				01		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Kota Blitar, Semua Kecamatan	1 Unit	13.857.200,00	DANA ALOKASI			13.857.200,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	, Semua Kel/Desa			UMUM (DAU)			
3	2	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	6	1	9	02		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	66.248.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit	66.248.600,00
3	2	0	2.0	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	6	1	9	06		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	82.340.300,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit	82.340.300,00
3	2	0	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
	6	1	9	09		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	67.027.953,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			67.027.953,00
3	2	0			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan		0,03 %	3.118.923.600,00			0,03 %	3.118.923.600,00
3	2	0	2.0		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase objek daya tarik wisata yang sesuai standar		68 %	2.160.000.000,00			70%	2.160.000.000,00
3	2	0	2.0	00	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota								
	6	2	1	05		Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Lokasi	2.160.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Lokasi	2.160.000.000,00
3	2	0	2.0	00	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota								
	6	2	1	08		Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang	0	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Orang	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	2	0	2.0		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota yang dikelola		3 Lokasi	943.423.600,00			3lokasi	943.423.600,00
3	2	0	2.0	00	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
				04		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	1 Unit	483.435.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	483.435.500,00
3	2	0	2.0	00	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
				08		Jumlah Orang Pengelola Strategis yang Dikembangkan	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	2 Orang	459.988.100,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Orang	459.988.100,00
3	2	0	2.0		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata Kabupaten/Kota yang dikelola		3 lokasi	15.500.000,00			3lokasi	15.500.000,00
3	2	0	2.0	00	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
				02		Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	10.000.000,00
3	2	0	2.0	00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
				06		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Laporan	5.500.000,00
3	2	0	2.0		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha pariwisata yang memenuhi standar		63 %	0			68%	0
3	2	0	2.0	00	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)								
				10		Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan	1 Usaha	0	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Usaha	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							, Semua Kel/Desa						
3	2	0	2.0	00	Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko								
						Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	1 Pelaku Usaha	0	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Pelaku Usaha	0
3	2	0	2.0	00	Pelaksanaan Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah								
						Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang di Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Usahanya	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	1 Badan Usaha	0	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Badan Usaha	0
3	2	0	2.0	00	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata		0,26 %	136.016.100,00			0,30%	136.016.100,00
3	2	0	2.0		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase produk pariwisata yang dipasarkan		2 %	136.016.100,00			3%	136.016.100,00
3	2	0	2.0	00	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri								
						Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	1 Dokumen	73.016.100,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	73.016.100,00
3	2	0	2.0	00	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri								
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	2 Promosi	63.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Promosi	63.000.000,00
3	2	0			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual		0,35 %	678.276.000,00			0,52%	678.276.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	2	0	2.0		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah produk ekonomi kreatif yang dikembangkan		3 jenis	678.276.000,00			3 jenis	678.276.000,00
3	2	0	2.0	00	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah								
						Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	1 Lembaga	24.766.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Lembaga	24.766.000,00
3	2	0	2.0	00	Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif								
						Jumlah terlaksanakannya pendukung pemasaran ekonomi kreatif	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	1 Promosi	646.760.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Promosi	646.760.000,00
3	2	0	2.0	00	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual								
						Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	1 Produk	6.750.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Produk	6.750.000,00
3	2	0			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi yang Dibentuk dan Beroperasi		22,05 %	222.571.200,00			24.13 %	222.571.200,00
3	2	0	2.0		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi		63 %	22.571.200,00			68%	22.571.200,00
3	2	0	2.0	00	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif								
						Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	30 Orang	22.571.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30 Orang	22.571.200,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	2	0	2.0		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mengembangkan kapasitasnya dengan mengadakan kerjasama		23 %	200.000.000,00			27%	200.000.000,00
3	2	0	2.0	00	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha								
						Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	1 Laporan	200.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Laporan	200.000.000,00
J U M L A H									13.642.674.000,00				13.783.078.929,00

BAB V PENUTUP

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata tahun 2025 sebagai penjabaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2026. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2026. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah.

1.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2026 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

1.2. Rencana Tindak lanjut

Dalam menghadapi tugas yang semakin kompleks, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pembinaan kepada generasi muda melalui kegiatan atau event daerah
- b. Mengusulkan pembentukan TACB Kota Blitar
- c. Melaksanakan Penyusunan Naskah Pokok Pikiran Kebudayaan daerah PPKD 2026
- d. Membuat jadwal pergelaran periodik dan menyediakan ruang untuk berkreasi terhadap kelompok seni budaya
- e. Melaksanakan sosialisasi terkait KBLI dan perizinan
- f. Melaksanakan pelatihan pengembangan produk kreatif
- g. Melaksanakan peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif
- h. Meningkatkan promosi melalui media sosial

- i. Melakukan pengumpulan data kinerja
- j. Melakukan survey pendataan pelaku ekonomi kreatif

Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar tahun 2026. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh aparatur Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.